

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Literasi Politik

Literasi mengacu pada kata "*literacy*" dari bahasa Inggris menurut Chambers English Dictionary yang memiliki definisi "*The Condition of Being Literacy*" yang berarti kondisi untuk melek politik. Istilah literasi sudah sangat lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia, bahkan beberapa praktisi maupun ilmuwan menggunakan kata literasi dalam berbagai kajian ilmu pendidikan. Kata literasi sering dikaitkan dengan beberapa konsep, seperti literasi politik, literasi media, literasi digital. Definisi literasi seringkali muncul ketika momen seperti pemilihan umum (PEMILU). Literasi politik menjadi periode baru di dunia perpolitikan yang digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan masyarakat, partai politik, lembaga penelitian dan pemerintah sebagai salah satu proses pendidikan dan partisipasi warga negara (Yayuk Hidayah, 2020).

Beberapa literatur mengenai literasi politik pada umumnya selalu mendasarkan pandangan dari sudut pandang politik dan pendekatan ilmu politik. Sudut pandang ini menitikberatkan kajian pada tanggung jawab partai politik, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat yang terkait, maupun pengamat politik. Konten literasi yang diulas pun sangat beragam, dimulai dari perilaku masyarakat, peran media, sosialisasi partai politik, tokoh politik, hingga isu-isu pemerintahan. Literasi politik merupakan suatu bagian terpenting dalam sebuah

proses sistem demokrasi. Masyarakat tidak akan memahami demokrasi termasuk pemerintahan dengan baik jika belum memiliki pemahaman tentang isu-isu politik dan kegiatan politik.

Definisi literasi politik menurut Bernard Crick (Jack Demaine, 2004: 181 dalam Maulana, 2022)) adalah suatu pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan bahaya yang merupakan upaya dalam memahami seputar isu politik, keyakinan, kecenderungan, serta kecenderungan mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Literasi politik merupakan keterampilan serta keterlibatan warga sipil muda dalam partisipasi politik.

Merujuk pada (Ivanna, 2024) literasi politik adalah bauran kompleks dan praktek-praktek sosial yang memungkinkan orang untuk menjadi warga negara yang aktif dan efektif. Warga komunitas dilengkapi pengetahuan dan tindakan dalam kehidupan mereka dalam kaitannya dengan politik lokal, nasional dan internasional. Mahasiswa melalui pengetahuan, skill dan sikap politiknya tak sekadar melek tetapi juga perlu berpartisipasi aktif dalam arus perubahan politik yang semakin dinamis.

2. Bentuk-Bentuk Literasi politik

Literasi politik mencakup berbagai bentuk yang memungkinkan individu untuk memahami dan berpartisipasi dalam kehidupan politik secara efektif (Hidayah et al., 2023). Beberapa bentuk literasi politik yang penting antara lain:

a. Literasi Pengetahuan Politik (*Political Knowledge*)

Bentuk ini mencakup pemahaman tentang sistem politik, struktur pemerintahan, partai politik, kebijakan publik, hak dan kewajiban warga negara, serta isu-isu sosial dan politik yang terjadi dalam suatu negara.

Contoh: Memahami proses pemilihan umum, peran DPR, atau cara kerja sistem hukum di negara.

b. Literasi Sikap Politik (*Political Attitude*)

Aspek sikap politik berkaitan dengan orientasi, pandangan, dan evaluasi individu terhadap kehidupan politik. Sikap politik menjadi penting karena menentukan bagaimana seseorang memposisikan dirinya dalam sistem politik yang ada, apakah bersikap apatis, kritis, atau partisipatif.

Menurut Almond dan Verba (1963) dalam karyanya *The Civic Culture*, sikap politik berperan sebagai faktor yang memengaruhi partisipasi warga negara dalam kehidupan politik. Mereka menegaskan bahwa warga negara yang memiliki sikap politik positif cenderung lebih aktif terlibat dalam kegiatan politik, sementara yang bersikap negatif cenderung pasif atau bahkan apatis (Hidayah et al., 2023).

c. Literasi Partisipasi Politik (*Political Participation Literacy*)

Literasi ini mencakup keterampilan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti memberikan suara dalam pemilu, bergabung dengan partai politik, mengikuti demonstrasi, atau bahkan berpartisipasi dalam forum diskusi politik.

Contoh: Menyusun argumen yang baik dalam debat politik, mengikuti kampanye, atau menulis surat kepada perwakilan rakyat.

d. Aspek Kesadaran Politik

Kesadaran politik adalah kemampuan individu untuk memahami, merasakan, dan menginternalisasi hak serta kewajiban politiknya sebagai warga negara. Kesadaran ini mencakup kepedulian terhadap isu-isu sosial, hukum, dan pemerintahan, serta kesadaran akan peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Individu yang memiliki kesadaran politik yang baik tidak hanya mengetahui pentingnya pemilu dan hak suara, tetapi juga memahami dampak kebijakan publik terhadap kehidupan sehari-hari dan mau terlibat aktif dalam proses demokrasi.

Kesadaran politik menjadi dasar partisipasi politik yang sehat karena mendorong warga negara untuk peduli terhadap lingkungan sosial dan tidak bersikap apatis terhadap persoalan politik. Contoh nyata dari kesadaran politik adalah sikap warga negara yang menyadari pentingnya memilih pemimpin yang berkualitas, memahami peran lembaga negara, serta aktif memberikan kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah dengan cara yang sesuai hukum.

e. Aspek Keterampilan Politik (Political Skill)

Keterampilan politik merupakan kemampuan individu dalam mengomunikasikan ide-ide politik, membangun jejaring sosial dan politik, serta memengaruhi proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik. Aspek ini menekankan pada kapasitas seseorang untuk berinteraksi,

berdiskusi, dan berargumentasi secara efektif dalam ruang politik, baik formal maupun informal.

Keterampilan politik tidak hanya terlihat dalam kemampuan berbicara di depan umum atau bernegosiasi, tetapi juga mencakup keahlian mengorganisasi kegiatan sosial-politik, memimpin kelompok, serta memanfaatkan media informasi untuk advokasi. Individu yang memiliki keterampilan politik yang baik mampu mengatur strategi komunikasi, membentuk opini publik, dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.

Contoh konkret keterampilan politik adalah kemampuan mahasiswa atau masyarakat dalam memimpin diskusi, mengelola organisasi kemahasiswaan atau komunitas, bernegosiasi dengan pihak berwenang, serta memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan ide dan memperjuangkan aspirasi secara efektif.

3. Dimensi Literasi Politik

Literasi politik tidak hanya sebatas pada kemampuan memahami informasi politik, tetapi juga mencakup sikap, perilaku, serta kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi dinamika politik. Menurut berbagai ahli, literasi politik setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam empat dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, behavioral, dan kritis.

a. Dimensi Kognitif

Dimensi kognitif berkaitan dengan pengetahuan politik yang dimiliki individu. Pengetahuan ini menjadi landasan dasar dalam literasi politik,

karena tanpa pemahaman yang memadai mengenai sistem politik, warga negara tidak dapat berpartisipasi secara efektif.

b. Dimensi Afektif

Dimensi afektif berhubungan dengan sikap, orientasi, kepercayaan, minat, dan kepedulian individu terhadap politik. Dimensi ini menentukan sejauh mana seseorang bersikap positif atau negatif terhadap politik serta nilai-nilai demokrasi.

c. Dimensi Behavioral

Dimensi behavioral mencerminkan perilaku nyata atau tindakan individu dalam kehidupan politik. Pengetahuan dan sikap politik yang baik biasanya akan terefleksikan dalam partisipasi politik yang aktif.

d. Dimensi Kritis

Dimensi kritis merupakan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, serta menilai isu-isu politik secara objektif. Dimensi ini sangat penting agar individu tidak hanya sekadar mengetahui dan berpartisipasi, tetapi juga mampu menilai apakah praktik politik sesuai dengan prinsip demokrasi.

4. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Literasi Politik

Ada beberapa faktor yang memengaruhi literasi politik antara lain:

a. Pendidikan dan Kurikulum

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan pembelajaran politik di sekolah memainkan peran besar dalam membentuk literasi politik siswa. Pengajaran yang efektif dan materi yang relevan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap isu-isu politik, sistem pemerintahan, dan hak-

hak kewarganegaraan. Pendidikan yang memadai tentang konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem politik negara akan memperkaya pengetahuan siswa tentang politik (Hidayah et al., 2023).

b. Pengalaman keluarga dan lingkungan

Keluarga adalah faktor penting dalam membentuk pandangan politik siswa. Diskusi politik di rumah, nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tua, serta peran keluarga dalam kehidupan sosial dan politik dapat memengaruhi sikap dan pemahaman siswa terhadap politik. Lingkungan tempat tinggal juga berperan, seperti adanya komunitas yang aktif berdiskusi politik atau adanya kebijakan lokal yang relevan dengan kehidupan mereka (Yayuk Hidayah, 2020).

c. Media massa

Media massa, baik tradisional (televisi, radio, surat kabar) maupun media sosial, memiliki pengaruh besar dalam membentuk literasi politik siswa. Siswa yang sering mengakses informasi politik melalui media cenderung memiliki pengetahuan politik yang lebih baik. Namun, media juga dapat memengaruhi pola pikir siswa jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menilai informasi secara kritis (seperti menghadapi berita palsu atau propaganda) (Yayuk Hidayah, 2020).

d. Minat dan motivasi

Minat pribadi terhadap isu-isu politik dan motivasi untuk memahami lebih dalam tentang politik sangat berpengaruh. Siswa yang tertarik dan ingin terlibat dalam politik cenderung memiliki literasi politik

yang lebih tinggi. Motivasi intrinsik (keinginan untuk memahami) atau ekstrinsik (dorongan dari lingkungan sekitar seperti teman, guru, atau keluarga) dapat memengaruhi sejauh mana siswa berusaha untuk mengembangkan literasi politik mereka. Minat pribadi terhadap isu-isu politik dan motivasi untuk memahami lebih dalam tentang politik sangat berpengaruh. Siswa yang tertarik dan ingin terlibat dalam politik cenderung memiliki literasi politik yang lebih tinggi. Motivasi intrinsik (keinginan untuk memahami) atau ekstrinsik (dorongan dari lingkungan sekitar seperti teman, guru, atau keluarga) dapat memengaruhi sejauh mana siswa berusaha untuk mengembangkan literasi politik mereka (Hidayah et al., 2023).

e. Peran Dosen dan Pengajaran

Dosen yang kompeten dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang politik dapat memberikan pengajaran yang lebih efektif, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan terlibat dalam diskusi politik. Metode pengajaran yang inovatif, seperti debat, simulasi pemilu, atau diskusi kelompok, dapat membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pengalaman guru dalam mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dan keterampilan berpikir kritis juga penting dalam meningkatkan literasi politik mahasiswa (Hidayah et al., 2023).

f. Akses terhadap Sumber Informasi

Akses yang memadai terhadap sumber informasi seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian politik membantu siswa untuk memperdalam

pemahaman mereka tentang berbagai topik politik. Akses ke internet dan berbagai platform digital juga memungkinkan siswa untuk menemukan beragam sudut pandang dan informasi politik. Keterbatasan akses terhadap informasi dapat menghambat perkembangan literasi politik siswa (Hidayah et al., 2023).

5. Konsep Luas Politik

a. Pengertian Politik

Politik memiliki banyak definisi, makna dan implikasi. Definisi kata KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) setidaknya memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama adalah “pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara (seperti dalam sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)”. Definisi lain adalah "semua masalah dan tindakan (kebijakan, taktik, dll.) yang mempengaruhi pemerintahan suatu negara atau negara lain. Dan pertanyaan ketiga adalah “bagaimana bersikap (Mahardika, 2024).

Dalam catatan sejarah, Aristoteles (384-322 SM), seorang filsuf Yunani kuno, adalah orang pertama yang memperkenalkan kata politik. Dia berargumen bahwa "orang adalah hewan politik atau hewan politik". Berangkat dari anggapan tersebut, ia mengawali penjelasannya dengan menyatakan bahwa hakikat kehidupan sosial memang bersifat politis karena interaksi antara dua orang atau lebih pasti melibatkan hubungan politik. Ini adalah kecenderungan manusia yang alami dan tak terhindarkan, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan diri

daripada bekerja sama dengan orang lain. Ketika orang mencoba mencapai kesejahteraan pribadi mereka melalui sarana yang tersedia dan membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas politik. Berdasarkan hal ini, Aristoteles menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk memaksimalkan kapasitas individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial tertinggi adalah melalui interaksi dengan orang lain dalam kerangka institusional yang dirancang untuk menyelesaikan konflik sosial dan membentuk tujuan bersama secara bijaksana.

Kata politik berasal dari kata Yunani polis, politicos (warga negara), politicos (kewarganegaraan). Di negara-kota zaman Yunani, orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran (baik, menurut Aristoteles) dalam hidup mereka. Ketika orang mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, mencapai kesejahteraan pribadi melalui sarana yang ada, atau membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas yang disebut politik.

Kata politik berasal dari kata Yunani polis, politicos (warga negara), politicos (kewarganegaraan). Di negara-kota zaman Yunani, orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran (baik, menurut Aristoteles) dalam hidup mereka. Ketika orang mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, mencapai kesejahteraan pribadi melalui sarana yang ada, atau membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas yang disebut politik.

Defenisi politik menurut Gabriel A. Almond et.al, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.

b. Ruang Lingkup Politik

Ruang lingkup politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, hubungan antar individu, kelompok, serta negara. Beberapa dimensi utama dalam ruang lingkup politik antara lain:

1) Sistem Pemerintahan

Struktur dan mekanisme organisasi negara yang mencakup lembaga-lembaga negara, pembagian kekuasaan, dan cara pengambilan keputusan dalam pemerintahan

2) Partai Politik

Organisasi yang dibentuk dengan tujuan untuk merebut kekuasaan politik, baik dalam bentuk pemilu maupun melalui saluran politik lainnya.

3) Kebijakan Publik

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjamin kesejahteraan umum. Kebijakan ini bisa

mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan.

4) Hubungan Internasional

Politik yang melibatkan hubungan antar negara dalam berbagai bentuk, seperti perjanjian internasional, kerjasama ekonomi, dan diplomasi.

5) Partisipasi Politik

Keterlibatan masyarakat dalam proses politik, baik melalui pemilu, demonstrasi, atau partisipasi dalam diskursus politik di ruang publik.

6) Isu-isu Sosial Tentang Politik

Persoalan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung, seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam

c. Hakikat Politik

Politik pada dasarnya berkaitan dengan kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa aspek hakikat politik yang penting untuk dipahami

1) Kekuasaan dan Pemerintahan

Politik adalah tentang siapa yang memegang kekuasaan, bagaimana kekuasaan tersebut didapatkan, dan bagaimana kekuasaan itu dijalankan dalam pemerintahan. Oleh karena itu, politik selalu melibatkan proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan distribusi sumber daya dan pengaturan kehidupan Bersama (Hidayati et al., 2022).

2) Kepentingan Politik

Politik bukan hanya soal individu, tetapi lebih kepada bagaimana kepentingan banyak orang atau kelompok dapat terwakili dan tercapai dalam suatu sistem pemerintahan yang adil. Proses politik ini mencakup upaya untuk mencapai konsensus atau kompromi antar berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda

3) Konflik dan Konsensus

Politik tidak bisa lepas dari adanya konflik kepentingan, baik antar individu, kelompok, maupun negara. Namun, politik juga berfokus pada upaya mencari solusi dan konsensus melalui dialog, negosiasi, dan kompromi, agar konflik bisa diselesaikan tanpa kekerasan

4) Tujuan Politik

Tujuan utama politik adalah mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial, dengan menciptakan sistem yang memungkinkan setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara setara dan adil

5) Ideologi Politik

Setiap sistem politik memiliki ideologi atau pandangan hidup yang menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan yang diambil. Ideologi ini dapat berupa demokrasi, sosialisme, kapitalisme, atau bentuk lainnya yang mempengaruhi cara berpikir dan cara bertindak dalam politik.

Secara keseluruhan, politik merupakan bidang yang dinamis, yang melibatkan berbagai aktor dan proses yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dalam rangka mencapai tujuan bersama, seperti keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian.

6. Hubungan Pendidikan dan Politik

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara.

Di dunia Islam, keterkaitan antara pendidikan dan politik terlihat jelas. Sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan dalam upaya memperkuat posisi politik kelompok dan pengikutnya. Dalam analisisnya tentang pendidikan pada masa Islam klasik, (Fitriani et al., 2022) menyimpulkan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan yang dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan pada waktu itu tidak hanya sebatas dukungan moral kepada para peserta didik, melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan, dan kurikulum. Dia menulis sebagai berikut:

Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Di lain pihak, ketergantungan kepada uluran tangan para penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-

lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku (Pratama et al., 2022) Berdasarkan kutipan di atas, dapat diketahui bahwa madrasah merupakan salah satu lembaga yang menjadi corong pesan-pesan politik, sebagai contoh madrasah Nizhamiyah di Baghdad.

Hal ini dapat dipahami, bahwa madrasah Nizhamiyah merupakan instrumen kebijakan politik yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk menanamkan doktrin kenegaraan yang memperkuat kerajaan. Pada masa itu, perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan mereka, sebab tujuan pemerintahan Islam, menurut (Farikiansyah et al., 2024) adalah 'menegakkan kebenaran dan keadilan, dengan syariat sebagai senjata. Syariat tidak akan berjalan bila umat tidak memahami ajaran Islam'. Ada dua alasan utama mengapa para penguasa Muslim sangat peduli dengan pendidikan. Pertama, karena Islam adalah agama yang totaliter jam'i, mencakup semua aspek kehidupan seorang Muslim mulai dari makan dan minum, tata cara berumah tangga, urusan sosial kemasyarakatan, sampai pada ibadah semuanya diatur oleh syariat. Untuk mengetahui bagaimana hidup yang Islami, seorang Muslim mesti terlibat dengan kegiatan-kegiatan pendidikan. Kedua, karena motivasi politik, sebab di dalam Islam antara politik dan agama sulit untuk dipisahkan.

Para penguasa Muslim sering menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menanamkan paham-paham keagamaan, menanamkan ideologi

negara dengan tujuan lahirnya kesamaan ide antara penguasa dan masyarakat umum sehingga memudahkan pengaturan masalah-masalah kenegaraan. Jadi pada masa kesultanan dan kerajaan Islam terdahulu, pendidikan disinkronisasikan dengan misi dakwah. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan dikelola oleh pemerintah. Pendidikan umum sebagai kelanjutan dari sistem pendidikan kolonial Belanda diserahkan kewenangannya kepada Kementrian Pendidikan, sedangkan pendidikan Agama berada dalam naungan Kementrian Agama.

Beberapa karakteristik kebijakan pendidikan pemerintah kolonial Belanda, yaitu: kolonialistik, intelektualistik, heterogen, diskriminatif, dan self-serving, diarahkan semata-mata untuk kepentingan kolonialisme. Kebijakan pendidikan tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat pada waktu itu, antara lain: (1) menimbulkan konflik keagamaan antara kelompok Muslim dan non-Muslim; (2) menciptakan divisi sosial dan kesenjangan budaya antara kelompok minoritas angkatan muda Indonesia yang berasal dari kelas menengah ke atas dan kelompok angkatan muda Indonesia yang berasal dari keluarga biasa; (3) menciptakan polarisasi sosial tanpa mempedulikan kemampuan kerja mereka; dan (4) menghambat perkembangan kaum pribumi. Pada masa awal kemerdekaan, kaum nasionalis dapat menguasai birokrasi dan sektor-sektor strategis.

Budaya politik dibentuk dan dikembangkan oleh pelaku politik dan apa yang akan ditentukan oleh pelaku politik sebagai ciri-ciri utama

budaya politik mereka sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh pendidikan mereka.

Jadi hubungan antara budaya politik dan pendidikan bersifat tidak langsung. Ini berarti pendidikan tidak secara final membentuk pelaku politik. Akan tetapi, pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku politik. Jika dasar- dasar ini baik dan kokoh, besar kemungkinan (probabilitasnya) akan lahir pelaku-pelaku politik yang baik.

7. Mata Kuliah Ilmu Politik

Mata kuliah Ilmu Politik mempelajari secara mendalam konsep-konsep dasar, teori, dan praktik politik dalam kehidupan bernegara. Kajian ini berfokus pada pemahaman mengenai dinamika kekuasaan, peran negara, sistem pemerintahan, serta mekanisme pengambilan keputusan politik. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya dikenalkan pada definisi dan konsep teoretis, tetapi juga diarahkan untuk menggunakan pendekatan ilmiah dalam menganalisis berbagai fenomena politik yang terjadi di tengah masyarakat(Hidayati et al., 2022).

Beragam teori menjadi landasan utama mata kuliah ini. Teori Negara membahas asal-usul negara dan legitimasi kekuasaan, termasuk pandangan teokrasi yang mengaitkan negara dengan kehendak Tuhan, teori kontrak sosial yang menjelaskan terbentuknya negara berdasarkan kesepakatan bersama, dan teori organik yang memandang negara sebagai organisme hidup. Teori Kekuasaan dan Kedaulatan menelaah sumber, bentuk, serta distribusi kekuasaan dengan merujuk pada klasifikasi Max

Weber tentang kekuasaan tradisional, karismatik, dan legal-rasional, serta membahas konsep kedaulatan sebagai puncak kekuasaan dalam negara. Teori Demokrasi menguraikan prinsip pemerintahan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, dengan menekankan perbedaan antara demokrasi langsung dan perwakilan serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik (Mahardika, 2024).

Selain itu, Teori Sistem Politik yang diperkenalkan David Easton menempatkan politik sebagai suatu sistem yang memproses tuntutan dan dukungan masyarakat menjadi kebijakan, lalu menghasilkan umpan balik terhadap sistem tersebut. Teori Perilaku Politik (Behavioralism) mengkaji perilaku individu dan kelompok secara ilmiah, termasuk pengenalan konsep budaya politik parokial, kaula, dan partisipan oleh Almond dan Verba. Teori Elite menjelaskan dominasi kekuasaan oleh kelompok kecil elite, sedangkan Teori Konflik Karl Marx memandang politik sebagai medan pertarungan kelas yang memperlihatkan negara sebagai alat kelas penguasa. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice) melihat keputusan politik melalui analisis ekonomi, dengan asumsi bahwa setiap aktor politik bertindak rasional untuk mencapai keuntungan maksimal. Terakhir, Teori Pembangunan dan Ketergantungan Politik membahas hubungan antara negara berkembang dan negara maju serta dampaknya terhadap dinamika politik global (Ginting, 2024).

Secara keseluruhan, mata kuliah Ilmu Politik memberikan bekal teoritis dan analitis kepada mahasiswa untuk memahami fenomena politik

secara komprehensif dan kritis. Pengetahuan ini menjadi landasan penting untuk mengembangkan kajian politik, hukum, pemerintahan, hubungan internasional, hingga pendidikan kewarganegaraan.

B. Penelitian Relevan

Penelitian mengenai literasi politik mahasiswa dan pendidikan kewarganegaraan telah banyak dilakukan dalam lima tahun terakhir. Beberapa diantaranya adalah:

Penelitian Wahyudi (2024) yang meneliti pengaruh pendidikan kewarganegaraan terhadap literasi politik pada siswa kelas XII SMA Negeri 12 Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik random sampling terhadap 206 siswa dan menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki pengaruh rendah terhadap literasi politik siswa. Hasil penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk literasi politik pada jenjang pendidikan menengah.

1. Penelitian (Tampubolon et al., 2024) yang menganalisis pengaruh pembelajaran literasi digital terhadap pemahaman mahasiswa PPKn Universitas Riau dalam menggunakan media sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap pemahaman mahasiswa, sehingga literasi digital menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran politik di era digital.
2. Penelitian oleh Rahmat (Rahmat et al., 2024) meneliti pengaruh penggunaan media sosial terhadap partisipasi politik mahasiswa PPKn

Universitas Negeri Padang pada Pemilu Presiden 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik mahasiswa, menegaskan peran media digital sebagai sumber informasi politik yang signifikan.

3. Penelitian (Noor et al., 2023) juga menyoroti hubungan antara media sosial dan literasi politik mahasiswa Universitas Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial berpengaruh positif terhadap literasi politik mahasiswa dengan kontribusi sebesar 18,9%. Temuan ini menekankan pentingnya pemanfaatan media digital secara tepat dalam pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan literasi politik mahasiswa.
4. Penelitian oleh (Darmawan, 2025) menggunakan pendekatan literatur untuk menelaah peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun karakter kebangsaan di era globalisasi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran politik mahasiswa, sekaligus memperkuat pemahaman kewarganegaraan global.

Dari keempat penelitian tersebut, terlihat adanya beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan terletak pada fokusnya terhadap literasi politik mahasiswa dan hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan, serta penggunaan pendekatan kuantitatif pada sebagian besar penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu antara lain terletak pada lokasi penelitian (Universitas Muhammadiyah Bengkulu), subjek (mahasiswa

semester VIII), dan metode yang lebih komprehensif dengan menggabungkan kuantitatif, wawancara, dan observasi, serta mempertimbangkan pengaruh media digital dalam membentuk literasi politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru, khususnya dalam memahami literasi politik mahasiswa di konteks lokal Universitas Muhammadiyah Bengkulu.